

MENUJU KAMPUS MODERAT: MEMBUAT KEBIJAKAN DAN PRAKTIK MODERASI BERAGAMA DI INSTITUT ISLAM MA'ARIF JAMBI

Arfan Aziz

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

arfanaziz@uinjambi.ac.id

Muhammad Rafii

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

muhammad.rafii@uinjambi.ac.id

S. Sagap

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

seggafuinjambi@gmail.com

Abstract: This study was conducted by questioning the policy of religious moderation in Islamic universities which seemed to be forced without considering the needs and interests of various parties. So that the existence of the policy is sometimes only in the form of a formal institution which results in insignificance for the practice of moderation in universities. Therefore, this study aims to analyze the process of making and implementing the policy of religious moderation at the Ma'arif Islamic Institute (IIM) Jambi. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was obtained through interviews and analysis of IIM Jambi documentation. The results of the study show that IIM Jambi was not in a hurry to adopt a policy of religious moderation without considering the conditions and readiness of the academic community. The policy was formulated through several stages, namely: first, the preparation of a policy agenda initiated through seminar activities; second, the formulation and legitimization of the policy through limited discussions in the internal environment of IIM Jambi officials; and third, the determination and implementation of the policy of religious moderation in the form of a hidden policy. This hidden policy has an important impact on the practice of religious moderation which is manifested through a tolerant, inclusive, and moderate attitude among the academic community of IIM Jambi. By carrying out these stages, the campus can form a moderate and adaptive religious attitude towards various differences.

Keywords: Moderate Campus, Education Policy, Hidden Policy, Religious Moderation Practices

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan mempersolkan kebijakan moderasi beragama di perguruan tinggi Islam yang terkesan dipaksakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak. Sehingga keberadaan kebijakan tersebut terkadang hanya berbentuk lembaga formal

yang mengakibatkan tidak signifikan bagi praktik moderasi di perguruan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan moderasi beragama di Institut Islam Ma'arif (IIM) Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumentasi IIM Jambi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa IIM Jambi tidak tergesa-gesa dalam mengadopsi kebijakan moderasi beragama tanpa mempertimbangkan kondisi dan kesiapan sivitas akademika. Kebijakan tersebut disusun melalui beberapa tahap, yakni: pertama, penyusunan agenda kebijakan yang diinisiasi melalui kegiatan seminar; kedua, formulasi dan legitimasi kebijakan melalui diskusi terbatas di lingkungan internal pejabat IIM Jambi; dan ketiga, penetapan dan implementasi kebijakan moderasi beragama dalam bentuk *hidden policy*. *Hidden policy* ini memberikan dampak penting dalam praktik moderasi beragama yang dimanifestasikan melalui sikap toleran, inklusif, dan moderat di kalangan sivitas akademika IIM Jambi. Dengan melakukan tahapan ini, kampus dapat membentuk sikap keberagamaan yang moderat dan adaptif terhadap berbagai perbedaan.

Kata Kunci: Kampus Moderat, Kebijakan Pendidikan, Hidden Policy, Praktik Moderasi Beragama

A. Pendahuluan

Kampus sebagai institusi pendidikan tinggi menjadi ruang pertarungan wacana, ideologi dan pengetahuan yang dapat menghegemoni dan menguasai wacana di tengah sivitas akademika.¹ Wacana keagamaan yang hadir ke permukaan tidak lepas dari produksi pengetahuan yang berkembang dalam dunia akademik dan masyarakat luas.² Salah satu wacana yang diproduksi pemerintah dalam satu dekade ini adalah moderasi beragama yang menjadi agenda prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Indonesia.

Moderasi beragama di perguruan tinggi merupakan jawaban terhadap berbagai isu radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme yang telah menyebar luas dan mengakar di perguruan tinggi.³ Beberapa riset telah membuktikan bahwa radikalisme sebagai pemikiran dan pemahaman telah merasuki beberapa perguruan tinggi Islam, baik yang bergerak dari wilayah dakwah,⁴ politik kampus,⁵ maupun organisasi kemahasiswaan.⁶ Akibatnya, mahasiswa maupun dosen di beberapa kampus Islam telah terindikasi mengikuti dan menganut gerakan dan pemahaman yang bertentangan dengan ideologi negara Indonesia, Pancasila.⁷

¹ Tim Penulis, *Peta Jalan Perguruan Tinggi Islam Di Indonesia* (Kota Depok: LP3ES, 2023).

² M. Zainal Anwar, Wedi, Agus, Abraham Zakki Zulhazmi, *Wacana Keagamaan Di Indonesia Pasca Reformasi* (Surakarta: IAIN Surakarta Press, 2020).

³ Benny Afwadzi and Miski, "Religious Moderation in Indonesian Higher Education: Literature Review," *Ulul Albab* 22, no. 2 (2021).

⁴ Muhammad Nur Yamin, Millah Hanifah, and Bakhtiar Bakhtiar, "Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa," *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 16, no. 1 (2021): 25–35.

⁵ Zulkifli dan Iim Halimatussa'diyah M. Zaki Mubarak, "Kebijakan Deradikalisasi Di Perguruan Tinggi: Studi Tentang Efektifitas Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Mencegah Perkembangan Paham Keagamaan Radikal Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Ui, Ugm Dan Uin Maulana Malik Ibrahim Malang)," *ISTIQRO'* 16, no. 1 (2018): 1–28.

⁶ T Saifullah and Teuku Yudi Afrizal, "Potensi Radikalisme Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Malikussaleh)," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2021), <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/reusam/article/view/5980/0>.

⁷ Muhammad Harfin Zuhdi, *Kontra Radikalisme & Terorisme: Counter Terhadap Ideologi Radikal* (Mataram: Sanabil, 2016).

Merespon gerakan dan fenomena tersebut Kementerian Agama menjadikan moderasi beragama sebagai tawaran pemahaman dan sikap beragama di perguruan tinggi Islam.⁸ Hal ini ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam. Putusan tersebut memperlihatkan keseriusan dan urgensi moderasi beragama di lembaga pendidikan sehingga dapat memayungi kebijakan moderasi beragama di perguruan tinggi Islam.

Perguruan tinggi Islam secara bertahap mulai menindaklanjuti keputusan tersebut dengan berbagai kebijakan. Ragam kebijakan dan format pun tidak terhindarkan, dari rumah moderasi, pusat kajian moderasi, pesantren kampus, maupun yang dituangkan dalam visi dan misi perguruan tinggi.⁹ Namun, beberapa kebijakan yang menjadikan moderasi beragama sebagai struktural atau fungsional terkesan terburu-buru dan hanya menjiplak wajah moderasi beragama dari kebijakan kementerian.¹⁰ Hal ini tentu melahirkan berbagai kebijakan problematis dan tidak tepat sasaran, karena ide dan gagasan yang ingin dikembangkan di lingkungan kampus tanpa didahului dengan membangun pemahaman baik melalui seminar, loka karya, workshop atau diskusi ahli.¹¹

Moderasi beragama di perguruan tinggi Islam Jambi belum terlihat jelas bentuk , format, dan penerapannya, kecuali UIN Jambi yang telah memiliki rumah moderasi beragama. Namun di UIN Jambi belum bekerja signifikan dalam konteks penyebarluasan pemahaman moderasi beragama di lingkungan internal UIN maupun ke tengah masyarakat. Sebaliknya di perguruan tinggi Islam swasta justru semakin kabur untuk menelaah, melihat, atau menganalisis moderasi beragama yang dijalankan atau dilembagakan melalui kebijakan. Berbeda dengan kampus swasta lainnya, Institut Islam Ma'arif (IIM) Jambi sebagai perguruan tinggi yang berakar kuat pada nilai-nilai keagamaan tradisional dan memiliki afiliasi dengan organisasi keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama mencitrakan dan mewujudkan moderasi beragama di lingkungan internal kampus.

Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengambil sisi lain dari implementasi moderasi beragama yang diarusutamakan Kementerian Agama. Dua pembahasan utama dalam artikel ini, pertama akan mengurai bagaimana membuat kebijakan moderasi beragama di Institut Islam Ma'arif (IIM) Jambi seperti kegiatan diskusi, seminar, dan keputusan yang disepakati sivitas akademika, kemudian bagaimana IIM Jambi melaksanakan atau mempraktikkan kebijakan moderasi beragama tersebut. IIM Jambi dipilih dengan beberapa alasan: *pertama*, kampus tersebut berafiliasi dengan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama yang dikenal memiliki pemahaman dan pengalaman moderasi beragama di Indonesia, *kedua*, kampus ini telah memiliki pengalaman sejarah dalam berinteraksi dengan masyarakat Kota Jambi dan mengiringi perkembangan pendidikan tinggi Islam di Kota Jambi.

⁸ Imam Subchi et al., “Religious Moderation in Indonesian Muslims,” *Religions* 13, no. 5 (2022): 451, <https://www.mdpi.com/2077-1444/13/5/451>.

⁹ Burhanuddin Nunu and Ilmi Darul, “Typologies of Religious Moderation in Indonesian Higher Education Institutions,” *Journal of Indonesian Islam* 16, no. 2 (2022); Hasyim Muhammad, *Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di PTKIN* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022); Khamami Zada (Ed), *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta Pusat: Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa, 2019); Muhammad Nur, “Kearifan Lokal Sintuwu Maroso Sebagai Simbol Moderasi Beragama,” *Pusaka* 8, no. 2 (2020): 241–52.

¹⁰ Zainal Abidin Bagir and Jimmy Sormin, *Politik Moderasi Dan Kebebasan Beragama-Suatu Tinjauan Kritis* (Jakarta Pusat: Elex Media Komputindo, 2022).

¹¹ Arafat, *Kebijakan Publik: Teori Dan Praktik* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, untuk menggali secara mendalam dan sesuai kenyataan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan dengan tahapan berikut: observasi yang dilaksanakan sebelum dan saat penelitian berlangsung, wawancara mendalam pada pimpinan perguruan tinggi Institut Islam Ma'arif Jambi seperti Rektor, Wakil Rektor, Ketua LPPM, dan mahasiswa, berkaitan dengan konsep moderasi beragama, kebijakan moderasi beragama, dan praktik atau implementasi moderasi beragama di IIM Jambi. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam terkait penerimaan sivitas akademika terhadap moderasi beragama. Selain itu, peneliti melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama sivitas akademika IIM Jambi meliputi; Rektor, Wakil Rektor, dosen, dan mahasiswa. FGD dilakukan untuk memperoleh kesamaan informasi dan menghindari tumpang tindih data yang diperoleh. FGD berguna memperkaya data-data yang diperoleh pada saat observasi dan wawancara. Selain itu, data diperkaya dengan dokumen, seperti Renstra, kurikulum, serta visi dan misi institusi maupun program studi.

Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, berguna untuk memilih data yang relevan dari keseluruhan data yang diperoleh. Karena data pada saat pengumpulan data tidak seluruhnya relevan dan dapat digunakan sebagai data yang valid. Teknik berikutnya penyajian data, merupakan tahap penulisan temuan dan analisis hasil penelitian. Teknik ini sebagai salah satu teknik untuk menghasilkan analisis secara sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan. Terakhir verifikasi data, dilakukan untuk melihat konsistensi data dengan analisis, serta melakukan pengujian validasi data untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

C. Hasil Penelitian

Kebijakan moderasi beragama di Perguruan Tinggi Islam adalah upaya strategis untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang moderat antara nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai kebangsaan. Perguruan tinggi dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya memberikan pendidikan keislaman, tetapi ikut serta mempromosikan pemahaman inklusif dan toleran terhadap perbedaan. Oleh karena itu, membuat kebijakan tidak dapat menafikan kehadiran seluruh warga kampus, karena tanpa ada kepedulian dan rasa memiliki terhadap kebijakan yang ditetapkan, maka sulit untuk direalisasikan. Hasil penelitian ini akan menyajikan bagaimana proses pembuatan kebijakan, dan bagaimana warga kampus mempraktikkannya.

1. Membuat *Hidden Policy* Berbasis Moderasi Beragama

Institut Islam Ma'arif (IIM) Jambi yang baru berubah dari STAI Ma'arif Jambi memperlihatkan akselerasi kualitas dan kapasitas lembaga dalam mengembangkan pendidikan tinggi Islam di Kota Jambi. IIM Jambi sebagai perguruan tinggi yang berada di pinggiran Kota Jambi mampu bertahan dalam menghadapi arus perubahan digital dan tantangan dalam kehidupan umat beragama. Eksistensi IIM Jambi dari tahun ke tahun terus menampilkan dan mengelola perubahan perguruan tinggi tanpa harus menghilangkan akar tradisi.

Hal demikian semakin diperkuat sebagaimana diabadikan dalam landasan pemikiran yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) STAI Ma'arif Jambi 2018-2023 "sebagai perguruan tinggi Islam yang berhaluan Ahlussunnah Waljama'ah perlu menghasilkan lulusan yang menunjukkan adanya nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, lulusan perlu memiliki integritas

kepribadian dan moralitas religius baik dalam konteks kehidupan individual maupun sosial".¹² Landasan berpikir tersebut memuat beberapa gagasan penting; ahlussunnah waljama'ah, nilai-nilai Islam, integritas individu, dan moralitas religius.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar memiliki lembaga otonom yang mengurusi persoalan perguruan tinggi, yaitu Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), IIM Jambi termasuk bagian di dalam lembaga ini. IIM Jambi merupakan perguruan tinggi NU tertua di Jambi. Secara umum kehadiran IIM di Jambi mewarnai dinamika pendidikan keagamaan yang berkembang di lingkungan perguruan tinggi. Berpegang teguh pada prinsip dan ajaran-ajaran NU, kampus tersebut dapat merespon secara proaktif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, pendidikan, sosial keagamaan, dakwah, maupun politik.

Kalau untuk pengelolaan kampus kita, memang kita basicnya memang Nahdlatul Ulama. Kalau lihat sejarahnya ya ada kaitannya dengan pesantren As'ad. Alhamdulillah itu masih terjaga sampai saat ini.¹³

Historisitas IIM Jambi memperlihatkan bahwa kesinambungan dengan pondok pesantren menjadi sejarah penting bagi perkembangan pemikiran dan pemahaman di kampus ini. Pesantren As'ad sebagai salah satu pesantren besar di Provinsi Jambi memperkuat bahwa relasi pesantren dan perguruan tinggi memungkinkan perpanjangan semangat dan nafas ideologi keagamaan yang dianut dan dipegang teguh baik di lingkungan pesantren maupun kampus Islam. Menjaga relasi dan genealogi itu memungkinkan pemahaman dan sikap beragama akan terus mempertimbangkan konteks pesantren, NU, dan perguruan tinggi Islam.

Berawal dari sejarah tersebut akan membuka dan menyadarkan bahwa visi ideologis dan strategis IIM Jambi tidak dapat dilepaskan dari akar pendiriannya. Wacana moderasi beragama tentu merupakan diskursus keagamaan baru secara formil, namun belum dapat dipastikan apakah seluruh warga kampus menerima, memahami, dan menilai wacana tersebut relevan untuk dikembangkan di perguruan tinggi ini. Oleh karena itu, perlu melihat bagaimana pemahaman moderasi beragama di IIM Jambi, untuk menindaklanjuti pada wilayah strategis yaitu membuat kebijakan berbasis moderasi beragama.

Rektor IIM Jambi menyampaikan bahwa moderasi beragama sebagai pemahaman yang berupaya menghindari sikap ekstrim kiri dan kanan. Hal demikian tentu sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh Kementerian Agama. Meskipun demikian IIM Jambi baru pada tahap sosialisasi kepada seluruh warga kampus, lebih detail sebagaimana diungkapkan dalam wawancara berikut:

Kalau moderasi itu kan keseimbangan, ada upaya menghindari ekstrim dan kekerasan. Kalau di kampus ini, kita memang walaupun belum punya rumah moderasi beragama, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh dosen, pengelola dan juga mahasiswa untuk memberikan edukasi kepada sivitas akademika terkait konsep moderasi beragama ini. Makanya beberapa kegiatan kita sudah lakukan seperti seminar terkait pemahaman dan edukasi moderasi beragama di STAI Maarif Jambi ini.¹⁴

Kutipan di atas memperlihatkan pemahaman moderasi beragama yang dimiliki oleh pimpinan IIM Jambi sangat baik, tepat dan memiliki pengaruh bagi warga kampus. Tentu pernyataan tersebut tidak lepas dari pengetahuan yang membekali pimpinan untuk mengambil sikap terkhusus dalam wacana moderasi beragama di perguruan tinggi Islam. Hal demikian

¹² RENSTRA STAI Ma'arif Jambi Tahun 2018-2023.

¹³ Interview, Wakil Rektor I IIM Jambi (Kota Jambi, 12 Oktober 2023).

¹⁴ Interview, Rektor IIM Jambi (Kota Jambi, 14 Oktober 2023).

menjadi modal penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan tinggi dalam membumikan atau menjadikan nilai-nilai moderasi sebagai budaya atau iklim akademik di lingkungan kampus.

Pimpinan perguruan tinggi memiliki posisi strategis untuk melangsungkan setiap nilai, wacana, atau ide yang dianggap berarti bagi lembaga maupun warga kampus. Oleh karena itu, salah satu manifestasi daripada upaya menguji wacana moderasi beragama, IIM Jambi melakukan seminar yang dihadiri oleh mahasiswa dan dari berbagai latar belakang organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pimpinan perguruan tinggi menyadari bahwa moderasi beragama sebelum ditetapkan dan dijalankan ia harus diuji ke hadapan warga kampus, sebagai langkah untuk mengidentifikasi bagaimana pemahaman dan penerimaan sivitas akademika terkait moderasi beragama.

Salah seorang dosen misalnya, merespon dengan sangat baik dan rinci. Ia menyatakan bahwa moderasi beragama sebagai wacana keagamaan di dalam tubuh organisasi keagamaan Islam sudah biasa, hanya saja ketika dikemukakan ke masyarakat, wacana tersebut masih tumpang tindih. Artinya ada hal yang belum selesai dalam penyebarluasan informasi terkait moderasi beragama. Ia menambahkan bahwa moderasi beragama tidak ada masalah, ide yang bagus, dalam konteks “mu’amalah”. Tapi tidak pada wilayah akidah dan ibadah.¹⁵

Moderasi beragama sebagai wacana keagamaan atau tawaran pemikiran dan pemahaman keagamaan dapat diterima ataupun ditolak. Seperti pernyataan dosen di atas, ia menerima moderasi beragama dengan syarat, yaitu hanya pada wilayah mu’amalah atau aktivitas sosial. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pimpinan IIM Jambi, bagaimana mendukung persoalan moderasi beragama di kampus tersebut, apakah memungkinkan untuk diterapkan. Oleh karena itu, seorang mahasiswa yang mewakili organisasi kemahasiswaan internal kampus menegaskan, “kami dak ada masalah dengan berbagai organisasi mahasiswa, mau NU, Muhammadiyah, GMKI dan lain-lain”.¹⁶ Mereka kerap terlibat dalam kerja-kerja sosial bersama, seperti mendiskusikan kebijakan pemerintah, sampai melakukan demonstrasi bersama.

Sivitas akademika kampus menyadari bahwa moderasi beragama sikap dan pemahaman dalam beragama yang merupakan bagian penting dalam kehidupan umat beragama saat ini. Warga IIM Jambi menyadari bahwa kampus tersebut berakar pada pemikiran dan pemahaman keagamaan yang berafiliasi pada organisasi keagamaan Islam di Indonesia yaitu NU. Komitmen bersama yang dimiliki oleh masyarakat kampus untuk meninjau dan menelaah moderasi beragama dalam perspektif NU. Berangkat dari pembacaan tersebut warga kampus yang diwakili oleh pimpinan, dosen, staf dan mahasiswa menyepakati bahwa moderasi beragama tidak ada persoalan untuk ditetapkan sebagai kebijakan di IIM Jambi. Namun, hal tersebut tidak terlalu ditonjolkan, tidak terlalu diperlihatkan secara tegas, artinya IIM Jambi tetap berupaya membungkus semangat moderasi beragama dalam kebijakan kampus secara implisit.

Hal ini ditindaklanjuti sebagaimana dicantumkan semangat dan indikator moderasi beragama tersebut dalam kurikulum pendidikan program studi (Prodi) yang berada di IIM Jambi. Seperti jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir didirikan dengan tujuan “menghasilkan sarjana muslim cendikiawan (*ulil-albab*) yang ahli di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jama'ah”.¹⁷ IIM Jambi menegaskan bahwa setiap program studi yang ada di kampus tersebut tidak dibenarkan untuk keluar dari paham

¹⁵ Interview, Dosen IIM Jambi, 15 Oktober 2023.

¹⁶ Interview, Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa IIM Jambi, 15 Oktober 2023.

¹⁷ Kurikulum Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir STAI Ma'arif Jambi 2020-2023.

Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja). Salah satu alasannya adalah menghidupkan dan terus melestarikan semangat Aswaja sebagai kerangka berpikir dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Tindak lanjut dari tujuan tersebut prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IAT) IIM Jambi menyusun kurikulum pendidikan dengan beberapa landasan utama yang dinilai relevan dengan kehidupan umat beragama dan perkembangan masyarakat modern hari ini.

Pertama, landasan filosofis, di mana kurikulum harus mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal. Perguruan Tinggi diharapkan mampu meramu antara kepentingan memajukan proses pembelajaran yang berorientasi kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan unsur keragaman budaya peserta didik yang dapat menghasilkan capaian pembelajaran dengan kemampuan memahami keragaman budaya di tengah masyarakat, sehingga menghasilkan jiwa toleransi serta saling pengertian. *Kedua*, landasan psikologis, di mana kurikulum harus mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral dan berakhlaq mulia, mampu berkolaborasi, toleran, dan terdidik.¹⁸

Landasan utama dalam penyusunan kurikulum prodi IAT IIM Jambi di atas memuat tiga ide besar, yaitu eksistensi budaya lokal, toleransi, dan saling pengertian. Argumentasi tersebut menegaskan realitas budaya lokal dan toleransi di Indonesia menjadi perhatian penting bagi sebagian masyarakat Islam dan perguruan tinggi. Jurusan yang memiliki kekuatan pengetahuan pada warisan klasik yaitu tradisi ilmu tafsir menjadi relevan untuk terus mengukuhkan semangat masyarakat dalam melestarikan dan menghargai budaya lokal serta sesama masyarakat.

Oleh karena itu, dalam pendidikan IIM Jambi menyelenggarakan dan memberikan mata kuliah yang sesuai dengan semangat dan nilai-nilai moderasi beragama, seperti Aswaja, Pancasila, serta Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Mata kuliah Aswaja yang diajarkan di dalamnya memuat pembahasan *tawazun*, *i'tidal*, *ishlah*, *tasamuh*, dan *tawasuth*.¹⁹ Semangat dan nilai moderasi beragama secara formal diajarkan kepada seluruh mahasiswa. Hal ini pun dilakukan karena memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang diajarkan NU dalam wilayah sosial. Sehingga semangat moderasi beragama dapat diinternalisasikan melalui nilai-nilai yang diajarkan melalui nilai Aswaja dan NU.



Gambar 1
Simbol IIM Jambi Komitmen terhadap NU

Slogan yang terpanjang di halaman kampus IIM Jambi, "Nahdlatul Ulama Benteng Terakhir" memperlihatkan bahwa kampus ini secara historis-legal berafiliasi pada organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Adagium "NU Benteng Terakhir" memberi isyarat kepada seluruh sivitas akademika bahwa IIM Jambi akan terus

¹⁸ Kurikulum Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir STAI Ma'arif Jambi 2020-2023.

¹⁹ Interview Wakil Rektor I IIM Jambi, 15 Oktober 2023.

menjadikan NU sebagai pusat rujukan, alarm moral dan pemikiran, serta pemandu membangun perguruan tinggi Islam di masa mendatang.

Bagian lain yang penting dalam perguruan tinggi salah satunya adalah bidang penelitian. IIM Jambi membangun kebijakan terkait penelitian yang menyentuh aspek moderasi beragama pada wilayah mu'amalah. Kampus ini mengutamakan topik dan isu penelitian meliputi: a) bidang sosial, politik dan keagamaan, b) bidang hubungan antar umat beragama, c) bidang Islam dan gender, dan d) bidang hubungan Islam dan negara.²⁰ Tema-tema tersebut dapat menjadi wadah dan memperkuat perwujudan moderasi beragama pada wilayah penelitian. Hal demikian dinilai penting untuk memperkuat pengetahuan terkait moderasi beragama, sekaligus menyebarluaskan nilai-nilai moderasi beragama melalui publikasi dan diseminasi hasil penelitian.

Turunan kebijakan lainnya (tidak tertulis) yaitu terkait penerimaan dosen dan mahasiswa non-muslim. IIM Jambi telah membuka dan tidak membatasi sivitas akademika kampus hanya untuk umat Islam. Hal ini dapat diperkuat dari pernyataan Rektor IIM Jambi berikut:

Kita pernah adakan diskusi sesama dosen terkait penerimaan dosen yang non-Muslim di STAI Ma'arif Jambi, tidak pernah kita batasi selama sesuai dengan kebutuhan kampus. Begitu juga sosialisasi mahasiswa baru kita juga adakan ke sekolah-sekolah non-Muslim.²¹

Kebijakan ini memperlihatkan sivitas akademika IIM Jambi telah memiliki kedewasaan dan pemahaman yang matang terkait moderasi beragama. Putusan menerima dosen dan mahasiswa non-Muslim di lingkungan kampus menguatkan bahwa moderasi dan toleransi telah menjadi kebutuhan yang harus dihadirkan ke hadapan publik untuk menghargai dan memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk masuk ke IIM Jambi, tanpa melihat identitas keagamaan mereka.

2. Moderasi Beragama di IIM Jambi: Praktik Sivitas Akademika

Kesepakatan bersama terhadap penerimaan moderasi beragama secara terbatas telah melahirkan sikap alamiah yang dilahirkan sivitas akademika IIM Jambi di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Komitmen tersebut sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan kesadaran bersama dan tidak ada penolakan, hanya penerimaan atau penerapan secara terbatas. Hal ini mempertimbangkan bahwa moderasi beragama sebagai wacana dan tawaran keberagamaan sedang masa penyebarluasan ke berbagai sektor, pendidikan maupun pemerintahan.

Warga kampus IIM Jambi dalam praktik moderasi beragama telah terwujud pada aspek pendidikan maupun interaksi sosial di dalam kampus. Hal ini memperlihatkan bahwa secara umum moderasi beragama telah menjadi bagian tidak terpisahkan terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi di dalam kampus, seperti kejujuran, professional, dan kebebasan. Praktik moderasi beragama akhirnya sejalan dengan semangat yang dimiliki oleh IIM Jambi dalam menyelenggarakan perguruan tinggi Islam.

Praktik moderasi beragama di IIM Jambi dalam bidang pendidikan terlihat pada kebebasan mahasiswa untuk mengutip dalam penulisan karya ilmiah yang bersumber dari selain al-Qur'an maupun hadits. Hal ini mempertegas bahwa kampus ini menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran akademik dalam menulis tugas akhir seperti skripsi. Informasi ini diketahui dari hasil wawancara bersama Rektor sebagai berikut:

²⁰ Tim Penyusun, "Panduan Penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi" (Kota Jambi: STAI Ma'arif Jambi, 2020).

²¹ Interview, Rektor IIM Jambi, 14 Oktober 2023.

Dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa, kita tidak anti dengan konsep-konsep Barat. Tidak ada keharusan atau pemaksaan untuk merujuk pada al-Qur'an dan hadits.²²

Keterbukaan, keadilan, dan kebijaksanaan pimpinan IIM Jambi diperlihatkan melalui pernyataan di atas yang memberikan kebebasan untuk menerima berbagai konsep, ilmu pengetahuan, maupun teori dari dunia Barat. Hal demikian menjadi bukti penerimaan dan sikap beragama yang moderat dan objektif untuk melakukan kajian atau penelitian ilmiah di lingkungan kampus. Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman dan pandangan yang berupaya memaksakan al-Qur'an maupun hadits dalam menulis karya ilmiah telah terjadi di berbagai perguruan tinggi atau pandangan umum masyarakat muslim.

Keterbukaan pemikiran di atas diperkuat dengan sikap mahasiswa yang menerima dari berbagai latar agama di kampus IIM Jambi. Ini menjadi petunjuk bahwa kebijakan terbatas atau tersembunyi melalui kurikulum pendidikan yang diterapkan oleh program studi di IIM Jambi telah berhasil mempengaruhi dan memberi nilai bagi pemahaman mahasiswa terkait interaksi non-Muslim. Bahkan menariknya salah seorang mahasiswa merespon dengan positif bahwa kehadiran non-Muslim di IIM Jambi tidak ada persoalan, baginya mahasiswa atau warga non-Muslim masuk ke kampus tersebut akan memperdalam pengetahuan mereka tentang Islam baik yang bersumber dari berbagai literatur maupun praktik warga muslim di lingkungan kampus.²³

Oleh karena itu, komitmen mereka sangat tinggi terhadap nilai-nilai toleransi, kesediaan berinteraksi dan berkolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan non-Muslim dinilai untuk memperkuat gerakan mahasiswa di dalam maupun di luar kampus. Komitmen dan cita-cita bersama sebagai mahasiswa menjadi ruang pertemuan penting bagi kelangsungan semangat toleransi dan saling pengertian antar lintas organisasi dalam menjunjung tinggi idealisme mahasiswa.



Gambar 2
Foto Bersama Pimpinan dan Mahasiswa IIM Jambi

Dalam interaksi sosial di lingkungan kampus pun dosen dan mahasiswa memiliki sikap toleransi yang tinggi dari berbagai paham keagamaan terkhusus di internal Islam. Tidak melihat NU, Muhammadiyah, Salafi, di dalam kampus IIM Jambi sivitas akademika saling menghargai terhadap pilihan beragama setiap individu. Hal demikian dapat dilihat dari pernyataan mahasiswa berikut:

²² Interview, Rektor IIM Jambi, 14 Oktober 2023.

²³ Interview, Mahasiswa IIM Jambi, 15 Oktober 2023.

Kami tidak pernah dipermasalahkan menggunakan cadar, saya memakai cadar, dari awal kuliah di sini. Dari dosen tidak ada yang keberatan, mahasiswa juga tidak ada. Dosen dan mahasiswa di sini menerima saya memakai cadar.²⁴

Pengakuan di atas mendeskripsikan bahwa keterbukaan dan penerimaan terhadap pandangan dan sikap beragama merupakan realitas alamiah yang terjadi di IIM Jambi. Seluruh sivitas akademika menghargai dan mengakui keberadaan mahasiswa bercadar tanpa ada penolakan dari dosen maupun rekannya di lingkungan kampus. Kenyataan ini menjadi simbol “keterbukaan” yang dijunjung tinggi sebagai ekspresi dan aktualisasi dari sikap beragama yang moderat. Oleh karena itu, penting memberikan edukasi secara informal berbasis pada praktik nyata sebagai pilihan dalam mempromosikan dan menanamkan nilai-nilai moderasi beragama di perguruan tinggi.

D. Diskusi

Membuat kebijakan di sebuah lembaga pendidikan adalah langkah penting untuk memastikan jalannya proses belajar-mengajar berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Proses ini tidak hanya sekadar membuat aturan, tetapi juga memikirkan bagaimana aturan tersebut bisa diterima dan diterapkan oleh semua pihak yang terlibat, seperti dosen, mahasiswa, dan mitra. Dalam menyusun kebijakan, penting untuk memahami kebutuhan dari semua pihak di lembaga tersebut, termasuk tantangan yang dihadapi sehari-hari. Oleh karena itu, kebijakan yang baik tidak dibuat oleh satu orang, melainkan melibatkan antara berbagai pihak agar hasilnya lebih komprehensif dan adil.

Proses pembuatan kebijakan harus partisipatif, melibatkan dosen, staf, mahasiswa dan mitra untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut relevan dan dapat diterima oleh semua pihak. Sehingga kebijakan yang dibuat dapat beradaptasi dengan kebutuhan sivitas akademika, perkembangan zaman, terutama dalam hal perubahan kurikulum yang terus terjadi. Hal ini penting agar kebijakan tersebut tetap relevan dan bisa menjawab tantangan baru dalam dunia pendidikan.²⁵ Di samping itu, sebuah kebijakan harus selalu dievaluasi secara berkala agar bisa terus diperbaiki sesuai dengan kebutuhan. Dengan pendekatan yang fleksibel dan partisipatif, kebijakan bisa menjadi pedoman yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mendorong kemajuan dan inovasi bagi suatu lembaga.²⁶

Proses perumusan kebijakan di IIM Jambi dilakukan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, mengadakan seminar yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, sivitas akademika, dan masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan masukan dan pandangan terhadap penerapan moderasi beragama di perguruan tinggi. Seminar ini merupakan tahap awal yang krusial dalam proses perumusan kebijakan. Melalui forum ini, berbagai perspektif dan isu utama dapat diidentifikasi, sehingga menjadi landasan yang kokoh bagi pengembangan kebijakan. Dengan melibatkan banyak pihak secara langsung, seminar memperkuat legitimasi kebijakan yang akan atau sedang dirumuskan.

Urgensi penyelenggaraan seminar sebagai tahap awal perumusan kebijakan menjadi penting karena seminar berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun berbagai perspektif dan masukan dari para ahli dan pemangku kepentingan. Seminar tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi, tetapi juga membantu mengidentifikasi isu dan peluang yang dapat dipertimbangkan selama proses pembuatan kebijakan. Dengan melibatkan berbagai pihak,

²⁴ Interview, Mahasiswa IIM Jambi, 15 Oktober 2023.

²⁵ Sahya Anggra, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014).

²⁶ Awan Y. Abdoellah, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016).

proses pembuatan kebijakan menjadi lebih inklusif dan berlandaskan pada data yang kuat, sehingga keputusan diambil lebih tepat sasaran dan diterima secara luas oleh semua pemangku kepentingan.²⁷

Urgensi ini semakin ditegaskan dalam mengantisipasi potensi hambatan atau tantangan yang mungkin timbul selama fase implementasi kebijakan. Karena kegiatan seminar kerap kali menjadi pertemuan berbagai pihak dalam mendiseminasi hasil penelitian atau pemikiran yang dapat dikonsumsi publik. Bukan hanya itu, seminar justru dapat menghadirkan peserta dari berbagai latar belakang berbeda, termasuk pandangan terhadap pembahasan atau tema dalam seminar tersebut.

Kedua, IIM Jambi menyelenggarakan diskusi terbatas terkhusus pejabat di lingkungan internal IIM Jambi yang bertujuan menganalisis lebih lanjut hasil seminar dan mendiskusikan pilihan kebijakan terkait isu atau pembahasan moderasi beragama. Diskusi ini dirancang untuk menganalisis lebih lanjut hasil yang dikumpulkan dari seminar, menyempurnakan dan mempersempit opsi kebijakan. Para pejabat berkolaborasi untuk meninjau kelayakan, dampak potensial, dan keselarasan kebijakan yang diusulkan dengan tujuan lembaga. Sehingga keputusan yang diambil dapat dipastikan adalah hasil analisis mendalam, sekaligus mempertahankan fleksibilitas untuk beradaptasi perubahan di masa mendatang. Pada akhirnya, tinjauan internal ini menjadi dasar bagi fase pengambilan keputusan akhir.²⁸

Diskusi terbatas semacam ini akan memperlihatkan pandangan asli dari setiap orang. Karena sifatnya tertutup dan tidak diketahui oleh publik, sehingga memungkinkan terjadi diskusi mendalam tentang kebijakan moderasi beragama. Ruang diskusi tersebut akan menjadi penentu terhadap keputusan lembaga, karena pejabat yang dihadirkan akan memberikan masukan secara normatif maupun empiris, termasuk bagaimana tantangan dan resiko terkait penerapan wacana keagamaan bagi lembaga maupun pengguna.²⁹ Konteks inilah yang diharapkan dalam proses pembuatan kebijakan, tidak serta merta lahir dan menerbitkan aturan tanpa ada kajian, diskusi, dan pertimbangan strategis dalam penetapan kebijakan.

Tahap terakhir adalah pengambilan keputusan, yaitu penetapan kebijakan yang dihasilkan melalui tahap pertama dan kedua di atas. Penetapan kebijakan ini dilaksanakan melalui rapat pimpinan pejabat di lingkungan IIM Jambi. Sehingga kebijakan ini tidak hanya miliki seorang pemimpin, tapi seluruh pejabat yang berada di bawahnya merasa memiliki terhadap kebijakan dan keputusan yang ditetapkan. Proses inilah yang kemudian dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil IIM Jambi bersifat partisipatif, apresiatif, dan komprehensif. Kebijakan yang diputuskan meliputi: Rencana Strategis, kurikulum pendidikan, pedoman penulisan karya ilmiah, dan kebijakan terkait kode etik dosen dan mahasiswa IIM Jambi. Dalam putusan tersebut terlihat bahwa kebijakan berada pada aspek strategis, normatif-paradigmatis, dan empiris-praktik. Sehingga kebijakan yang diambil dapat menaungi dan memayungi seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan perguruan tinggi.

²⁷ Dadi Mulyadi, "Menuju Perguruan Tinggi Berbasis Riset Dan Penganalisis Kebijakan," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasи* 12, no. 1 (2015): 17–28, <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/232>.

²⁸ Abd Madjid, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Sidoarjo: Samudra Biru, 2018).

²⁹ Ainur Rizqiyah Rizqi, "Perumusan Kebijakan Pendidikan Islam: Tahapan Formulasi Kebijakan Pada Pendidikan Islam," *Taklimuna: Journal of Education and Teaching* 2, no. 2 (2023): 1–10, <https://ejournal.staidu.ac.id/index.php/taklimuna/article/view/77>.

Kebijakan IIM Jambi terkait moderasi beragama secara keseluruhan terletak pada wilayah internal dan dokumentasi yang menyisipkan nilai-nilai moderasi beragama (*Hidden Policy*). Dengan demikian proses pembuatan kebijakan moderasi beragama di IIM Jambi dapat dilihat sebagaimana pada bagan berikut.



Bagan 1. Proses atau Tahap Pembuatan Kebijakan³⁰

Pertama, penyusunan agenda kebijakan, tahap ini menghadirkan mitra, stakeholder, maupun sasaran kebijakan. Tahap ini kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan seminar yang dapat menghadirkan atau mengundang publik. Kedua, formulasi dan legitimasi kebijakan, diskusi terbatas, diskusi berkelanjutan, dan rapat penetapan kebijakan. Sebagai agenda perumusan atau penetapan kebijakan, tentu tidak dapat menghindari adanya perdebatan dan penolakan atau penerimaan terhadap kebijakan yang akan diambil. Oleh karena itu, tahap ini akan mendiskusikan formulasi dan sekaligus melegitimasi terhadap putusan kebijakan lembaga. Ketiga, implementasi kebijakan, tahap yang memperlihatkan bahwa praktik dan implementasi memperlihatkan penerimaan dan kesepakatan setiap warga kampus terhadap komitmen menjalankan kebijakan.

Praktik moderasi beragama di IIM Jambi memperlihatkan rasa kepemilikan setiap warga kampus terhadap kebijakan moderasi beragama. Praktik-praktik dalam perkuliahan, tugas karya ilmiah, sampai pada penerimaan dosen dan mahasiswa non-Muslim menjadi petunjuk penting bahwa praktik moderasi beragama telah menjadi sesuatu yang disepakati bersama. Konteks ini kemudian mempertegas bahwa kebijakan yang diambil secara komprehensif, melibatkan seluruh partisipasi seluruh anggota lembaga akan memperkuat penerapan kebijakan terlaksana di kemudian hari.

Beberapa kebijakan yang diambil bersama seperti di atas telah menjadi perhatian setiap lembaga dalam mengelola kebijakan. Studi-studi terdahulu yang mempertegas bahwa kebijakan bersama akan meningkatkan loyalitas pada lembaga, komitmen terhadap kinerja, dan memperkuat solidaritas di lingkungan lembaga.³¹ Bahkan kebijakan yang berarti bagi setiap orang, akan mewujudkan perbedaan dalam kehidupan di lingkungan lembaga tersebut.³² Oleh karena itu, penelitian ini memperkuat dan mendukung bahwa kebijakan yang memberikan partisipasi dari berbagai pihak berkepentingan akan menjadi kunci dalam pengelolaan dan pemutusan kebijakan di era modern.

³⁰ Irawaty Igiris, *Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Empiris* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022).

³¹ Nurdiana Gaus et al., "The Analysis of Policy Implementation Models in Higher Education: The Case Study of Indonesia," *Policy Studies* 40, no. 1 (2019): 92–109, <https://doi.org/10.1080/01442872.2018.1539224>.

³² Irawaty Igiris, *Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Empiris*.

Kebijakan partisipatif memperkuat bahwa setiap keputusan yang diambil oleh atas nama lembaga akan menjadi miliki seluruh anggota instansi. Hal ini memperkuat kemungkinan penerapan moderasi beragama di perguruan tinggi menjadi pilihan suka rela setiap individu di lingkungan kampus.³³ Beberapa fakta di atas menggambarkan bahwa mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan memiliki perhatian terhadap persoalan moderasi beragama. Tidak dapat disangkal, keinginan sivitas akademika menerapkan kebijakan yang diputuskan terkait moderasi beragama merupakan warna dan pandangan baru dalam berinteraksi dengan semua orang di tengah realitas perbedaan agama maupun pilihan beragama.

Komitmen tersebut diperlihatkan melalui sikap inklusivitas mahasiswa maupun dosen dalam beragama. Perbedaan agama di lingkungan organisasi kemahasiswaan misalnya, bukan penghambat mahasiswa untuk melakukan kerjasama dalam berbagai kepentingan publik terkait persoalan politik maupun sosial. Kolaborasi antar lintas organisasi menjadi semangat dan kekuatan gerakan mahasiswa dalam mempersoalkan dan mengkritik kebijakan pemerintah. Hal ini dapat terjadi karena adanya pemahaman dan sikap beragama yang inklusif di lingkungan mahasiswa.

Sikap toleransi diperlihatkan di dalam maupun di luar kampus tidak hanya berlaku pada agama yang berbeda. Di internal agama Islam, mahasiswa dan dosen menghargai dan menerima perbedaan pandangan keagamaan terhadap praktik-praktik keislaman. Kasus mahasiswa bercadar misalnya, penerimaan sivitas akademika justru mengamalkan sikap toleran, ramah, dan tidak diskriminatif terhadap pilihan mahasiswa dalam hal simbol keagamaan yang berbeda. Tidak ada penolakan, pem Margiran, dan stereotipe terhadap mahasiswa bercadar merupakan indikator toleransi sesuai semangat dan nilai-nilai moderasi beragama.

E. Kesimpulan

Kebijakan moderasi beragama sebagai wacana keagamaan di perguruan tinggi Islam telah populer di lingkungan Kementerian Agama. Institut Islam Ma'arif (IIM) Jambi sebagai lembaga perguruan tinggi Nahdlatul Ulama memiliki ketertarikan dan persamaan nilai dengan gagasan yang diarusutamakan oleh Menteri Agama tersebut. Namun, dalam perumusan kebijakan formil di lingkungan IIM Jambi, kampus ini tidak tergesa-gesa mengadopsi tanpa mempertimbangkan sivitas akademika kampus. Oleh karena itu, IIM Jambi melakukan beberapa tahap dalam membuat kebijakan terkait moderasi beragama. Pertama, penyusunan agenda kebijakan yang ditindaklanjuti dalam kegiatan seminar. Kedua, diskusi terbatas dan berkelanjutan di lingkungan internal pejabat IIM Jambi. Ketiga implementasi kebijakan yang diawali dengan membuat *hidden policy* terkait moderasi beragama, meliputi: wilayah strategis yaitu Rencana Strategis, wilayah normatif-paradigmatis yaitu pada kurikulum program studi dan tujuan program studi, dan wilayah empiris-praktik yang mempertimbangkan historisitas IIM Jambi dan sivitas akademika IIM Jambi. Konsekuensi *hidden policy* diputuskan bagi praktik moderasi beragama di lingkungan kampus memberikan pandangan dan sikap beragama yang toleran, inklusif, dan moderat bagi sivitas akademika. Hal ini memperlihatkan bahwa proses membuat kebijakan yang dilakukan telah memberikan komitmen dan rasa memiliki terhadap kebijakan moderasi beragama yang ditetapkan di lingkungan IIM Jambi.

BIBLIOGRAPHY

Ainur Rizqiyah Rizqi. "Perumusan Kebijakan Pendidikan Islam: Tahapan Formulasi

³³ Nina Angelia et al., "Analysis of Community Institution Empowerment as a Village Government Partner in the Participative Development Process," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* Vol 3, no. 2 (2020): 1352–59.

- Kebijakan Pada Pendidikan Islam.” *Taklimuna: Journal of Education and Teaching* 2, no. 2 (2023): 1–10. <https://ejournal.staidu.ac.id/index.php/taklimuna/article/view/77>.
- Angelia, Nina, Beby Masitho Batubara, Rizkan Zulyadi, Taufik Wal Hidayat, and Riri Rezeki Hariani. “Analysis of Community Institution Empowerment as a Village Government Partner in the Participative Development Process.” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* Vol 3, no. 2 (2020): 1352–59.
- Arafat. *Kebijakan Publik: Teori Dan Praktik*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Awan Y. Abdoellah. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Bagir, Zainal Abidin, and Jimmy Sormin. *Politik Moderasi Dan Kebebasan Beragama-Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta Pusat: Elex Media Komputindo, 2022.
- Benny Afwadzi and Miski. “Religious Moderation in Indonesian Higher Education: Literature Review.” *Ulul Albab* 22, no. 2 (2021).
- Gaus, Nurdiana, Muhammad Yunus, Abdul Karim, and Haleema Sadia. “The Analysis of Policy Implementation Models in Higher Education: The Case Study of Indonesia.” *Policy Studies* 40, no. 1 (2019): 92–109. <https://doi.org/10.1080/01442872.2018.1539224>.
- Hasyim Muhammad. *Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di PTKIN*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Irawaty Igirisca. *Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Empiris*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022.
- Khamami Zada (Ed). *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. Jakarta Pusat: Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa, 2019.
- Kurikulum Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir STAI Ma'arif Jambi 2020-2023.
- M. Zaki Mubarak, Zulkifli dan Iim Halimatussa'diyah. “Kebijakan Deradikalisasi Di Perguruan Tinggi: Studi Tentang Efektifitas Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Mencegah Perkembangan Paham Keagamaan Radikal Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Ui, Ugm Dan Uin Maulana Malik Ibrahim Malang).” *ISTIQRO'* 16, no. 1 (2018): 1–28.
- Madjid, Abd. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Sidoarjo: Samudra Biru, 2018.
- Muhammad Harfin Zuhdi. *Kontra Radikalisme & Terorisme: Counter Terhadap Ideologi Radikal*. Mataram: Sanabil, 2016.
- Mulyadi, Dadi. “Menuju Perguruan Tinggi Berbasis Riset Dan Penganalisis Kebijakan.” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 12, no. 1 (2015): 17–28. <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/232>.
- Nunu, Burhanuddin, and Ilmi Darul. “Typologies of Religious Moderation in Indonesian Higher Education Institutions.” *Journal of Indonesian Islam* 16, no. 2 (2022).
- Nur, Muhammad. “Kearifan Lokal Sintuwu Maroso Sebagai Simbol Moderasi Beragama.” *Pusaka* 8, no. 2 (2020): 241–52.
- RENSTRA STAI Ma'arif Jambi Tahun 2018-2023.
- Sahya Anggra. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Saifullah, T, and Teuku Yudi Afrizal. “Potensi Radikalisme Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Malikussaleh).” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2021). <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/reusam/article/view/5980/0>.
- Subchi, Imam, Zulkifli Zulkifli, Rena Latifa, and Sholikatus Sa'diyah. “Religious Moderation in Indonesian Muslims.” *Religions* 13, no. 5 (2022): 451. <https://www.mdpi.com/2077-1444/13/5/451>.
- Tim Penulis. *Peta Jalan Perguruan Tinggi Islam Di Indonesia*. Kota Depok: LP3ES, 2023.

Tim Penyusun. "Panduan Penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi." Kota Jambi: STAI Ma'arif Jambi, 2020.

Wedi, Agus, Abraham Zakki Zulhazmi, dan M. Zainal Anwar. *Wacana Keagamaan Di Indonesia Pasca Reformasi*. Surakarta: IAIN Surakarta Press, 2020.

Yamin, Muhammad Nur, Millah Hanifah, and Bakhtiar Bakhtiar. "Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 16, no. 1 (2021): 25–35.